



RENCANA KERJA (RENJA) 2026

Disusun Oleh:

KECAMATAN SANGATTA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas Anugerahnya dan Karunianya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026 bisa disusun dengan baik. Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintah yang baik (Good goverment) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sebagai salah satu unsur penting dari sitem ini. Rencana Kerja (Renja) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Secara legislatif formal sebagaimana peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic planning) yang ditetapkan melalui Renja OPD masing-masing.

Renja OPD dalam tataran operasional, ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dan merupakan proses partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memutuskan semua kegiatan pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Oleh karena itu, Kecamatan Sangatta Utara telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasin strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus mengacu pada Renja yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (Cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja Kecamatan Sangatta Utara ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam : 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (Workplan and budget); 2) Menyusun perjanjian kinerja (Performance agreement); 3) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dilingkungan Kecamatan Sangatta Utara dan 4) Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangatta Utara ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026.

Sangatta Utara, 14 Januari 2025

Camat Sangatta Utara



Hasdiah, SE, M.Si
Pembina Tk.I/IV b
NIP.197412212001122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1. 3 Hubungan Antar Dokumen	4
1. 4 Maksud dan Tujuan Penyusunan	5
1. 5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	7
2.1 Kondisi Umum Wilayah	7
2.2 Aspek Demografis	14
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14
2.4 Aspek Pelayanan Umum	15
2.5 Permasalahan Pembangunan	17
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun Lalu	20
2.7 Hambatan	27
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	42
BAB V PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) dan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Sebagai tindak lanjut hal tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD Kecamatan Sangatta Utara.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Sangatta Utara memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program OPD Kecamatan Sangatta Utara yang ditetapkan dalam RENSTRA.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk merencanakan program kegiatan di sesuaikan dengan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sangatta Utara.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan;

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Rencana kerja OPD Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026, merupakan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Kutai Timur yaitu Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja OPD berdasarkan Misi Kabupaten Kutai Timur yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Kutai Timur melimpahkan beberapa tugasnya kepada Camat Sangatta Utara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

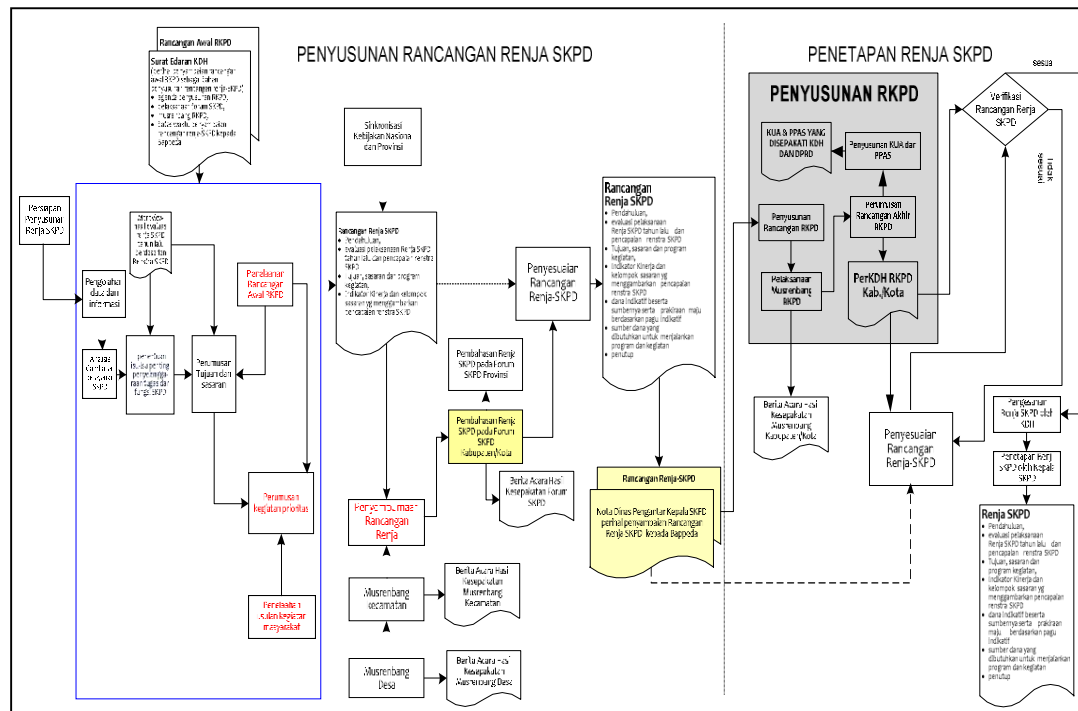
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja yang berpedoman pada Transisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangatta Utara adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen Renja OPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

Bab ini memuat kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Kutai Timur tahun 2025-2029 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi Bupati terpilih. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan capaian kinerja yang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi tentang arahan Kepala Daerah bagi OPD dalam rangka menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Kondisi Umum Wilayah

Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 yang mengatur pembagian wilayah Negara “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”, bahwa Camat sebagai pimpinan Kecamatan disamping melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

gambaran geografis wilayah Kecamatan yang terkait dengan faktor –faktor penunjang kegiatan Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan Sangatta Utara adalah salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, terletak di sebelah selatan dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta Utara) yang merupakan pusat pengembangan kawasan Kutai Timur dengan batas – batas wilayah :

Utara : Kecamatan Bengalon
Timur : Selat Makassar
Selatan : Kecamatan Sangatta Selatan
Barat : Kecamatan Rantau Pulung



Berdasarkan data administratif, Kecamatan Sangatta Utara memiliki luas wilayah sekitar 33.356 (Tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam) hektare. Luas wilayah ini terbagi ke dalam beberapa desa/kelurahan, baik yang sudah definitif maupun desa persiapan. Adapun desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sangatta Utara adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Teluk Lingga dengan luas lebih kurang lebih 3.178 Ha;
2. Desa Sangatta Utara dengan luas lebih kurang 4.756 Ha;
3. Desa Singa Gembara dengan luas lebih kurang 5.606 Ha;
4. Desa Swarga Bara dengan luas lebih kurang 19.807 Ha;

5. Desa Persiapan Teluk Rawa (Bagian dari Desa Sangatta Utara) dengan luas lebih kurang 176 Ha dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas lebih kurang 4.756 Ha;
6. Desa Persiapan Singakarta (Bagian dari Desa Sangatta Utara) dengan luas wilayah lebih kurang 500 Ha dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas lebih kurang 4.756 Ha;
7. Desa Persiapan sangatta Prima (Bagian dari Desa Sangatta Utara) dengan luas wilayah lebih kurang 316 Ha dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas lebih kurang 4.756 Ha.

Sumber : Profil Kecamatan Sangatta Utara 2025

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Data Aparatur Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Pegawai ASN Kantor Camat Sangatta Utara dan Kelurahan Teluk Lingga

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN
1	Hj. Hasdiah, SE.,M.Si	IV/b	Camat
2	Muhamad Yunus, SE., M.Si	IV/a	Sekretaris Kecamatan
3	Nani Uminarti,S,Th,M.Si	IV/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4	Elysabeth Artikawati,S.St	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5	Bernadus Parembang,Sp	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum / Plt. Kasi Pemerintahan Umum
6	Siti Marfuah, SE	III/d	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
7	Noorma, S.Stp	III/d	Lurah
8	Dra. Hariyati	III/d	Sekretaris Lurah
9	Abd. Wahab Agus, SE	III/d	Plt.Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
10	Nurhayati, S.A.P	III/c	Plt.Kasubag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
11	Evrin Abriantikah, S.IP	III/c	Plt. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
12	Yusfina Pamilangan, S.M	III/c	Fasilitator Pemerintahan
13	Yulinda Oktriana,S.Sos	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
14	Arrang Bulan, SE	III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
15	Hj. Munawwarah, S.Sos	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
16	Yanti Tonapa, Sh	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
17	Siti Fatimah,A.Md	III/a	Pengelola Data dan Informasi
18	Artanti, S.Sos	III/a	Fasilitator Pemerintahan
19	Durahman, SE	III/a	Pamong Pemerintahan

20	Leginem Rohayanti	III/a	Penata Layanan Operasional
21	Muhammad Yamani	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
22	Wilhelmus Wio Doi, SE	III/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
23	Abdul Syakeer	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
24	Muhammad Azis Padu	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
25	Muslim Azhari	II/d	Penata Layanan Operasional
26	Dorina Lara Saty	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
27	Ahmad Sodikin	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
28	Rafli Diasamo	II/d	Operator Layanan Operasional
29	Suro Edipudjono	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
30	Nono Hariyanto	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
31	Dahliah	II/c	Pengadministrasi Perkantoran
32	Septian Sulanjana Pratinggo, A.Md.	II/c	Arsiparis Terampil
33	Dentiar Candra Samudya, A.Md.Kom.	II/c	Pranata Komputer Terampil
34	Taufik Rahman, A.Md	VI	Arsiparis Terampil
35	M. Jami	V	Pengadministrasi Perkantoran
36	Slamet Zaenal Arifin	V	Pengadministrasi Perkantoran
37	Devi Puspitasari, SE	XI	Penata Layanan Operasional
38	Dindum	V	Pengadministrasi Perkantoran
39	Prihatin, SE	XI	Penelaah Teknis Kebijakan
40	Arifain	V	Pengadministrasi Perkantoran
41	Ruslan	V	Pengadministrasi Perkantoran
42	Rusdi Rasyid	V	Pengelola Data dan Informasi
43	Supran	V	Pengadministrasi Perkantoran
44	Yevita Nugraha Sagita Palinggi, S.Hut	XI	Penelaah Teknis Kebijakan
45	Hj. Fauzah Maulidiyah, SE	XI	Penelaah Teknis Kebijakan
46	Erviyani, S.I.Kom	XI	Penelaah Teknis Kebijakan
47	Arman	V	Pengelola Data dan Informasi
48	Novianti Dudung	V	Pengelola Data dan Informasi
49	Indariyana Rusnong	V	Pengadministrasi Perkantoran
50	Linda Jumiaty Siregar, SE	XI	Penata Layanan Operasional
51	Reni Jaya, SE	XI	Pengelola Data dan Informasi
52	Belly Pratama Ersal, AP	XI	Penata Layanan Operasional
53	Siti Fatimah	V	Pengadministrasi Perkantoran
54	Kasifah, S.IP	XI	Pamong Pemerintahan

55	Astri Utari, S.M	XI	Penata Layanan Operasional
56	Fajar Alhamdani	V	Pengadministrasi Perkantoran
57	Gresya, S.Ak	XI	Penata Layanan Operasional
58	Sarah Sriyanti Siaba, S.P	XI	Pengadministrasi Perkantoran
59	Achmad Suryansyah Al Payet	V	Pengadministrasi Perkantoran
60	Jeni Widiandini, SE	XI	Pengelola Data dan Informasi
61	Eka Widarna	V	Pengadministrasi Perkantoran
62	Bejo Selamat, S.Hut	XI	Penalaah Teknis Kebijakan
63	H. Wahyu Purwadi, S.Sos	XI	Penelaah Teknis Kebijakan
64	Ahmad Musyafi	V	Pengadministrasi Perkantoran
65	Samsul	V	Pengadministrasi Perkantoran
66	Muh. Hardiansyah Mustapa	V	Pengadministrasi Perkantoran
67	Ramadhani Asmianata, S.Sos	XI	Penalaah Teknis Kebijakan
68	Areskya Rahmah, S.Pi	XI	Penalaah Teknis Kebijakan
69	Wahidah, S.P	XI	Penalaah Teknis Kebijakan

Struktur Organisasi Kantor Camat Sangatta Utara



Struktur Organisasi Kantor Lurah Teluk Lingga



2.2 Aspek Demografis

Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan, sementara sebagai subjek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan, oleh karena itu penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara. Jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2025 sesuai data profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 sebanyak 130.513 jiwa, terdiri dari 68.513 pria dan 62.000 wanita.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2022

No	Uraian	Kelurahan Teluk Lingga	Desa Sangatta Utara	Desa Singa Gembara	Desa Swarga Bara	Desa Persiapan Teluk Rawa	Desa Persiapan Sgt Prima	Desa Persiapan Singa Karta	Jumlah
1	KK	7.249	14.637	5.551	5.515	1.597	2.904	8.033	45.486
2	Laki-Laki	11.936	24.101	11.475	8.841	2.799	5.167	4.194	68.513
3	Perempuan	11.708	21.973	8.810	8.134	2.447	5.089	3.839	62.000

Sumber : Profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025

Dapat dilihat dari Tabel diatas penduduk Laki-laki di Kecamatan Sangatta Utara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Perempuan.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam menganalisis kesejahteraan ada beberapa hal atau aspek yang perlu diamati, yaitu :

pendapatan, pendidikan dan kesehatan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud ialah penerimaan kas yang diperoleh seseorang dan tiap keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan diperoleh dari tenaga kerja atau atas hak milik dan tunjangan dari pemerintahan. Di Kecamatan Sangatta Utara sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor pertambangan dan penggalan dengan jenis komoditas/subsektor .

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang menjadi hak asasi manusia dan hak milik

setiap warga Negara yang berhak menerima pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat dan terjangkau tanpa memandang status agama, status sosial, status ekonomi, status suku, status etnis dan lokasi geografi.

c. Kesehatan

Merupakan faktor dasar yang sangat mempengaruhi kesejahteraan penduduk dan indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat dapat memperjuangkan hak sehatnya untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Upaya ini agar bidang kesehatan diharapkan dapat merambah pada semua lapisan masyarakat tanpa adanya rasa deskriminatif. Kesehatan juga merupakan faktor kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai penuh obat yang dibutuhkan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024, berikut ini merupakan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Sangatta Utara :

a. Bidang Pendidikan

Tabel 2.3 Jumlah PAUD Negeri, PAUD Swasta, TK Negeri dan TK Swasta, TPA Negeri dan TPA Swasta

NO	JUMLAH PAUD NEGERI	JUMLAH PAUD SWASTA	JUMLAH TK NEGERI	JUMLAH TK SWASTA	TPA NEGERI	TPA SWASTA
1	-	27	2	41	-	7

Tabel 2.4 Jumlah SD/MI Negeri, SD/MI Swasta, SMP/MTs Negeri dan SMP/MTS Swasta

NO	JUMLAH SD/MI NEGERI	JUMLAH SD/MI SWASTA	SMP/MTS NEGERI	SMP/MTS SWASTA
1	14	14	5	12

Tabel 2.5 Jumlah SMU/MA, SMK, dan Perguruan Tinggi

NO	SMU/MA NEGERI	SMU/MA SWASTA	SMK NEGERI	SMK SWASTA	PERGURUAN TINGGI NEGERI	PERGURUAN TINGGI SWASTA
1	2	6	2	2	-	3

Tabel 2.6 Jumlah SLB

No	SLB NEGERI	SLB SWASTA
1	1	2

b. Bidang Kesehatan

Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan

No	Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	5
2	Puskesmas	2
3	Klinik	16
4	Posyandu	53
5	Apotik	4
6	Praktek Mandiri	4
7	Jaringan Kesehatan Lainnya	7

Tabel 2.8 Tenaga Kesehatan

No	Sarana	Jumlah
1	Dokter Spesialis	112
2	Dokter Umum	136
3	Dokter Gigi	29
4	Farmasi	141
5	Ahli Gizi	21
6	Tenaga Kesehatan	2.466
7	Dukun Terlatih	1

2.5 Permasalahan Pembangunan

1. Bidang Ekonomi

Sampai dengan akhir tahun 2024 keadaan perekonomian Kecamatan pada umumnya dan Desa – desa pada khususnya menunjukkan perkembangan yang relatif pesat dan mengembirakan. Hal ini secara umum dapat diketahui dari kehidupan sosial masyarakat dari berbagai sektor yang dipotong oleh sektor ketenagakerjaan berpeluang dengan adanya perkembangan dunia industri yang merekrut tenaga kerja cukup besar di 2 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor / Impor yang berskala Internasional disamping itu pula dengan dengan berbagai program Pemerintah yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan melalui berbagai Home industri di desa / kelurahan yang tersebar di 6 Desa dan 1 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sangatta Utara;

Selain dilihat dari penyerapan tenaga kerja, perkembangan yang mengembirakan juga dapat dilihat dari meningkatnya hasil pertahun produksi pertanian, sektor peternakan, industri, koperasi dan kewirausahaan

a. Sektor Pertanian

Langkah – langkah yang ditempuh di sektor pertanian meliputi :

- Meningkatkan pendapatan petani melalui upaya penyuluhan penyuluhan petugas PPL Pertanian di tiap – tiap desa / Kelurahan;
- Meningkatkan produksi pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan;

Seiring dengan upaya peningkatan sumberdaya alam dan konservasi tanah, sektor pertanian juga turut menunjang dalam nenangulangi bahaya rawan banjir di musim penghujan dan mengatasi rawan kering di musim kemarau dengan membenahi saluran saluran irigasi yang bisa menahan air;

Wilayah Kecamatan Sangatta Utara merupakan areal lahan pekarangan yang menyebar hampir di Semua Desa / Kelurahan. Komposisi tanaman dilahan pekarangan umumnya berupa campuran (multi komoditas). Berbagai macam komoditas baik berupa tanaman tahunan maupun tanaman semusim yang ditanam oleh petani. Petani juga menanam berbagai jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Jenis komposisi komoditas yang diusahakan berdasarkan

pemilihan dan mempertimbangkan tujuan utama budidaya apakah untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, komersial, konservasi, dan sebagainya dengan luas lahan sebagai berikut :

No	Jenis Komposisi	Luas Lahan
1	Tanaman Pangan	42.85 Ha
2	Tanaman Holtikultura	134,71 Ha
3	Tanaman Sayuran	13.537,51 Ha
4	Tanaman Biofarmaka	875 m3
5	Tanaman Perkebunan	1.294,55 Ha

b. Sektor Peternakan

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan terus mengalami peningkatan. Tahun 2024 populasi sapi di Kabupaten Kutai Timur mencapai 15.497 ekor dengan produksi daging mencapai 530.486,01 kg dan produksi telur mencapai 548.341,33 biji. Namun masih dibawah konsumsi masyarakat Kalimantan Timur sehingga masih memerlukan pasokan dari luar daerah.

Dalam usaha peningkatan populasi ternak sapi di Kalimantan Timur dilakukan pola pengembangan kawasan usaha peternakan sapi dengan pola Mini Ranch yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepemilikan ternak. Salah satu bentuk dukungan hal tersebut adalah kebijakan pemanfaatan lahan eks tambang dan integrasi dengan usaha lainnya. Pusat Peternakan Sapi Terpadu (PESAT) merupakan pemanfaatan area pasca tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh kelompok tani dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dapat dilihat dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jenis Komposisi	Jumlah
1	Hewan ternak dan unggas	1.847.132,99 kg
2	Budidaya ikan Air Tawar	165,32
3	Ikan Laut	569,70

c. Sektor Industri

Sektor Industri diprioritaskan pada pengembangan industri kecil dan home industri yang keberadaanya telah teruji tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, diupayakan perolehan modal melalui kredit lunak APBD dan pelatihan – pelatihan teknologi tepat guna (TTG) di desa – desa. Kendala dalam upaya perolehan dan pelatihan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya di Pedesaan untuk akan arti

pentingnya kesadaran perpendedidikan yang cukup dan peranan orang tua untuk mencegah anak putus sekolah (Droup Out);

Namun peningkatan potensi – potensi proses industri dan perluasan pemasaran terus menerus dilakukan, antara lain :

- Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih prduktif dan efisien;
- Memfasilitasi hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan untuk memperkuat struktur perekonomian pedesaan;
- Peningkatan Sumber daya manusia dalam pengembangan usaha kecil dan menengah;
- Disamping upaya – upaya tersebut untuk mencegah potensi daerah bekerjasama dengan dengan SATPOL Kabupaten Kutai Timur mengadakan sosialisasi yang sekaligus menginventarisir adanya industri kecil dengan tujuan untuk memotivasi kepada pemilik industri akan pentingnya perijinan suatu badan hukum untuk mempunyai bukti yang outentik;

d. Sektor Koperasi

Sektor Koperasi yang erat kaitannya dengan sektor industri kecil dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa langkah langkah yang yang dilakukan hampir sama dengan upaya peningkatan sektor industri kecil dan industri rumah tangga;

Upaya memantapkan kelembagaan terus dilakukan agar benar benar Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan dalam kehidupan masyarakat ditingkat menengah kebawah.

e. Kewirausahaan

Demikian juga dengan sektor kewirausahaan tidak berbeda jauh dengan sektor industri kecil / koperasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Kewirausahaan lebih ditujukan pada keanekaragaman hasil hasil industri kecil dan koperasi. Langkah – langkah yang ditempuh antara lain :

- Pemberdayaan pengusaha kecil , menengah dan koperasi agar lebih produktif dan efisien;
- Memfasilitasi hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan;
- Peningkatan Sumber daya Manusia dalam pengembangan kewirausahaan;

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun Lalu

Renja Kecamatan Sangatta Utara berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Timur sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD Se Kabupaten yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah kecamatan Sangatta Utara.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen perencanaan pembangunan untuk di susun saling berkaitan dan diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam table di bawah ini :

Tabel 2.9 Evaluasi Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangatta Utara Triwulan III Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Evidence	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase	Predikat
7.01.000.000.02.0	Kantor Camat Sangatta Utara					21,84 SR			12.178.607.984,00	6.910.832.794,00	56,91 R	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG UMUM/SAKSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan Dan Laporan Keuangan	%	100,00	0,00	0 SR			31.754.388.791,00	6.629.135.894,00	56,49 R	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	0,00	0 SR			38.483.667,00	20.450.000,00	53,14 R	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100 ST			31.316.267,00	15.158.000,00	48,4 SR	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	0,00	0 SR			7.167.400,00	5.292.000,00	73,83 S	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR			10.306.797.656,00	5.687.752.740,00	55,18 R	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75,00	66,00	88 T			10.207.707.656,00	5.643.292.740,00	55,28 R	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemantauan dan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25 SR			99.090.000,00	44.460.000,00	44,87 SR	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	0,00	0 SR			0,00		0 SR	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0 SR			0,00	0,00	0 SR	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0 SR			0,00		0 SR	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0 SR			0,00		0 SR	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR			10.654.000,00	1.500.000,00	14,08 SR	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1,00	0,00	0 SR			0,00		0 SR	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0 SR			10.656.000,00	1.500.000,00	14,08 SR	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5,00	0,00	0 SR			415.801.160,00	221.901.000,00	50,92 SR	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100 ST			21.893.500,00	20.780.000,00	94,91 ST	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100 ST			15.693.000,00	14.665.000,00	93,45 ST	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100 ST			46.566.000,00	35.446.000,00	76,12 T	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	9,00	75 S			295.582.640,00	109.372.000,00	37 SR	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	9,00	75 S			44.703.000,00	30.745.000,00	68,78 S	

7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	Dokumen	3,00	3,00	100	ST		11.403.000,00	10.893.000,00	95,53	ST
7.01.01.2.07	Pengalihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengalihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	SR		0,00	0,00	0	SR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	SR		0,00		0	SR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	SR		827.540.328,00	653.016.954,00	78,91	T
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	9,00	75	S		153.000.000,00	67.170.122,00	43,9	SR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	9,00	75	S		674.540.328,00	585.846.832,00	86,85	T
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	SR		114.970.000,00	44.519.200,00	38,72	SR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12,00	5,00	41,67	SR		89.310.000,00	26.579.200,00	29,76	SR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38,00	33,00	86,84	T		25.660.000,00	17.940.000,00	69,91	S
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	SR		0,00		0	SR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan	38,00	0,00	0	SR		47.371.675,00	37.470.000,00	78,93	T
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Laporan	2,00	0,00	0	SR		89.156.675,00	29.070.000,00	32,61	S
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1,00	0,00	0	SR		39.156.675,00	29.070.000,00	74,24	S
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan			0,00	0,00	0	SR		0,00	0,00	0	SR
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1,00	0,00	0	SR		0,00		0	SR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Camat	Laporan	1,00	0,00	0	SR		8.415.000,00	8.400.000,00	99,82	ST
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	300,00	0,00	0	SR		8.415.000,00	8.400.000,00	99,82	ST
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	%	100,00	0,00	0	SR		118.998.000,00	118.089.000,00	99,24	R
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1,00	0,00	0	SR		118.998.000,00	118.089.000,00	99,24	ST
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga masyarakat	15,00	15,00	100	ST		118.998.000,00	118.089.000,00	99,24	ST
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1,00	0,00	0	SR		0,00		0	SR
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	1,00	0,00	0	SR		200.000.000,00	74.818.000,00	37,41	SR

7.01.05.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50,00	0,00	0 SR		117.204.000,00	74.818.000,00	63,84	R
7.01.05.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	50,00	0,00	0 SR		82.796.000,00		0 SR	
7.01.06	PROGRAM SIKLOHISAL KELESTARIAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perilaku/Perkosa	pelanggaran	0,00	0,00	0 SR		61.374.518,00	57.746.900,00	94,09	ST
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Laporan	1,00	0,00	0 SR		61.374.518,00	57.746.900,00	94,09	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1,00	0,00	0 SR		56.014.518,00	52.386.900,00	93,52	ST
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1,00	1,00	100 ST		5.360.000,00	5.360.000,00	100	ST
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah	laporan	1,00	0,00	0 SR		0,00	0,00	0 SR	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1,00	0,00	0 SR		0,00		0 SR	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	5,00	0,00	0 SR		5.534.000,00	5.133.000,00	92,75	ST
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR		5.534.000,00	5.133.000,00	92,75	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	10,00	10,00	100 ST		5.534.000,00	5.133.000,00	92,75	ST
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0,00	0,00	0 SR		0,00		0 SR	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1,00	0,00	0 SR		0,00		0 SR	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat	%	100,00	0,00	0 SR		10.841.000,00	8.436.000,00	77,63	T
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1,00	0,00	0 SR		10.841.000,00	8.436.000,00	77,63	T

7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1,00	0,00	0 SR		7.241.000,00	6.916.000,00	95,53	ST
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1,00	0,00	0 SR		3.600.000,00	1.500.000,00	41,67	SR
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1,00	0,00	0 SR		0,00		0	SR
7.01.0.00.0.00.02.0	Kantor Lurah Teluk Linggi					28,97	SR	10.294.674.000,00	1.594.218.900,00	15,53	SR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG DESA/SAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	%	100,00	0,00	0 SR		491.063.750,00	318.392.600,00	64,84	R
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR		19.056.000,00	29.070.000,00	74,43	S
7.01.01.2.02.0003	Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0 SR		39.056.000,00	29.070.000,00	74,43	S
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR		32.000.000,00	26.000.000,00	81,25	T
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2,00	1,00	50 SR		32.000.000,00	26.000.000,00	81,25	T
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR		254.347.750,00	179.382.000,00	70,53	S
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20,00	0,00	0 SR		135.644.214,00	103.942.600,00	76,63	T
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0 SR		8.994.000,00	5.898.000,00	65,58	R
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	3,00	60 R		29.978.000,00	22.780.000,00	75,99	S
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	9,00	75 S		19.997.536,00	11.856.000,00	59,29	R
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	8,00	66,67 S		49.288.000,00	27.110.000,00	55	R
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50 SR		10.446.000,00	7.796.000,00	74,63	S
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jas	4,00	0,00	0 SR		11.7.000.000,00	50.020.000,00	42,75	SR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	9,00	75 S		45.000.000,00	23.020.000,00	51,16	R
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0 SR		72.000.000,00	27.000.000,00	37,5	SR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	0,00	0 SR		49.660.000,00	33.830.000,00	68,12	S
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9,00	6,00	66,67 S		38.250.000,00	24.830.000,00	64,92	R
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1,00	50 SR		11.410.000,00	9.000.000,00	78,88	T
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	persen	100,00	0,00	0 SR		9.801.610.250,00	1.277.516.000,00	13,04	SR

7.01.05.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1,00	0,00	0 SR		9.802.610.290,00	1.277.916.000,00	13,04 SR
7.01.05.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	5,00	0,00	0 SR		34.746.530,00		0 SR
7.01.05.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	56,00	0,00	0 SR		5.066.352.720,00	235.456.000,00	4,65 SR
7.01.05.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12,00	0,00	0 SR		4.701.511.000,00	1.042.460.000,00	22,17 SR

2.7 Hambatan

Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangatta Utara Semester I Tahun 2026 ini dilaksanakan untuk memastikan dan menilai target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa program yang tidak sesuai antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa kendala dalam evaluasi hasil terhadap Renja Tahun 2026 antara lain:

1. Terdapatnya inkonsistensi/perbedaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mengakibatkan tingkat capaian program/kegiatan tidak terukur.
2. Penyandingan program dalam RPJMD dengan Permendagri 90 Tahun 2019 memperngaruhi program pendukung capaian indikator sasaran daerah.
3. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
4. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait.
5. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran dan system terbaru dalam pencairan anggaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, maupun program-program prioritas nasional khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM dan SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Sangatta Utara lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2025 ini adalah dalam rangka Meningkatnya kualitas layanan publik.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sangatta Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
				Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	T4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11
2			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	90	91	92	93	94

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan di setiap OPD secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 mengacu pada peraturan berikut :

1. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

a. Dasar Perimbangan Penentuan Program dan Kegiatan

Dalam Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026, penentuan program dan Kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangatta Utara, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Sangatta Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2026 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	2	3	4	5	6
		KECAMATAN SANGATTA UTARA & KELURAHAN TELUK LINGGA			28.500.434.589
		KECAMATAN SANGATTA UTARA			8.125.760.589
I	7 . 01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	8.125.760.589
			Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	78	
A	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	40.000.000
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	40.000.000
B	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	7.035.760.589

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	7.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69 Orang/Bulan	6.905.760.589
2	7.01.01.2. 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	130.000.000
C	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
1	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000
D	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	135.570.500
1	7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	105.570.500
2	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	30.000.000
E	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	411.499.000
1	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	137.139.500

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
2	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	264.359.500
3	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000
F	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.000.000
1	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Ban	1 Unit	5.000.000
G	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	356.640.000
1	7.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dan Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dan Air dan Listrik	1 Laporan	153.000.000
2	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.640.000
H	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	131.290.500

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	7.01.01.2.09 .01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	89.310.000
2	7.01.01.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	30.000.000
3	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	11.980.500
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75%	50.000.000
A	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	40.000.000
1	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	40.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
B	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan	10.000.000
1	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	75%	550.000.000
A	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	50.000.000
1	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga kemasyarakatan	50.000.000
A	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	500.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	100.000.000
2	7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100.000.000
3	7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100.000.000
4	7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	100 Keluarga	100.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
		Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
5	7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100.000.000
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	55%	250.000.000
A	7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	50.000.000
1	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	7. 01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20%	80.000.000
A	7.01.05.2 .01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	80.000.000
1	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	30.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
2	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	35.000.000
3	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000
VI	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	75%	50.000.000
A	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	50.000.000
1	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	40.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
2	7.01.06.2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	10.000.000
		JUMLAH			8.905.760.589
		KANTOR LURAH TELUK LINGGA			19.594.674.000
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	200.000.000
			Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	78	
A	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	115.000.000
1	7.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	110.000.000
6	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 Dokumen	5.000.000
D	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	81.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
1	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dan Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dan Air dan Listrik	12 Laporan	45.000.000
2	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	36.000.000
D	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pennjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	4.000.000
1	7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	4.000.000
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir	75%	19.394.674.000
A	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	19.394.674.000
1	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5 Lembaga kemasyarakatan	40.000.000

NO	KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TOTAL PAGU ANGGARAN 2025
2	7.01.03.2.02 . 0002	Pembangunan sarana dan prasara kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	56 Unit	12.923.000.000
3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	6.406.674.000
3	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	25.000.000
		JUMLAH			19.597.674.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada Renja Tahun 2026 ini terdapat 6 Program yaitu terdiri dari 16 kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
Terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - b. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, terdiri dari :
 - Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 3 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :
 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Pembangunan sarana dan prasara kelurahan;
 - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - Evaluasi Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari :
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional;
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, terdiri dari :
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Program- program dalam RENJA 2025 akan dilaksanakan dan di anggarkan dalam penyusunan RKA Kecamatan dan akan di sinkronkan dengan Anggaran yang ada, apabila disetujui akan dimuat dalam DPA Kecamatan Sangatta Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE BERSAMA OPD	REALISASI CAPAIAN BERKAS OPD TAHUN 2024	PEKERJAAN CAPAIAN TARGET KEMAS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAS PENCAPAIAN					RELEMBOR SAGARAN	PEKERJAAN MAJU BERSAMA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENYUSUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											AKSIKAL	DIRERK		12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.00	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan & peninjauan Umum Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	411.490.000,00			-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	-	-	301.517.475,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.00.0002	Pengelolaan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas	Jumlah Fisik Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas yang Dikelola	-			6 Fisik	127.130.000,00	Rak. Nuku Timur, Sangatta Utara, Samudra Melindas	PEKERJAAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	-	-	106.000.000,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.00.0008	Pengelolaan Fasilitas Kantor dan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Fasilitas Kantor dan Komunikasi SKPD	-			12 Laporan	380.350.000,00	Rak. Nuku Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PEKERJAAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	-	-	377.517.475,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.00.0010	Penyelenggaraan Acara Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Daerah pada SKPD	-			1 Dokumen	10.000.000,00	Rak. Nuku Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PEKERJAAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	-	-	10.000.000,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.01	Pengelolaan Fasilitas Muka Daerah Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Daerah Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	5.000.000,00			-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	Program Koordinasi Sangatta Utara	-	5.390.000,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.01.0010	Pengelolaan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fisik Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	-			1 Fisik	5.000.000,00	Rak. Nuku Timur, Sangatta Utara, Samudra Melindas	PEKERJAAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan mutu layanan publik dan kepuasan masyarakat daerah	Program Koordinasi Sangatta Utara	-	5.390.000,00	KANTOR CABOT BANGKATTA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	PEKERJAAN CAPAIAN TARGET KEMAS OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGKUKAN PENCAPAIAN						RELEMPOR SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGKANG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											AKSIKAL	DIKIRAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.00	Pelayanan Jasa Pemangkas Urusan Perikanan (Dinas)	Jumlah Laporan Pemangkas Jasa Pemangkas Urusan Perikanan (Dinas)	-			1 Laporan	100.000.000,00			Mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor perikanan, penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	7. Peningkatan kualitas pelayanan publik sektor perikanan profesional dan akuntabel untuk meningkatkan inovasi dan pelayanan publik.	Program Kecamatan Sanggatu Utara	-	100.000.000,00	KANTOR GAMBAT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.00.0002	Pelayanan Jasa Konservasi, Budidaya Ikan dan Lahan	Jumlah Laporan Pemangkas Jasa Konservasi, Budidaya Ikan dan Lahan yang Disalurkan				1 Laporan	100.000.000,00	Rib. Nulu Tulu, Sanggatu Utara, Sanggatu Utara	PEMERINTAH ASLI GEMAS (PAG)	Mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor perikanan, penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	7. Peningkatan kualitas pelayanan publik sektor perikanan profesional dan akuntabel untuk meningkatkan inovasi dan pelayanan publik.	Program Kecamatan Sanggatu Utara		100.000.000,00	KANTOR GAMBAT BANGKATTA UTARA
	7.01.01.2.00.0004	Pelayanan Jasa Pelayanan Urutan Kotor	Jumlah Laporan Pemangkas Jasa Pelayanan Urutan Kotor yang Disalurkan				12 Laporan	200.000.000,00	Rib. Nulu Tulu, Sanggatu Utara, Sanggatu Utara	PEMERINTAH ASLI GEMAS (PAG)	Mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor perikanan, penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan kualitas pelayanan publik sektor perikanan	Program Kecamatan Sanggatu Utara		200.000.000,00	KANTOR GAMBAT BANGKATTA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENYANGKUTAN					RELEMBOR SASARAN	PELAKSANAAN MAJU BENDAHARA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENYANGKUTAN JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											ASASIAL	EMERAK		12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.00	Pemeliharaan Gedung GBB Darah Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemerintahan Daerah Darah Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah	-	-	-	11 Laporan	111.290.500,00	-	-	Mendukung kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi	-	111.290.500,00	-	KANTOR GAMAT BANGKATA UTARA
	7.01.01.2.00.0001	Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	-	-	-	12 Laporan	88.540.000,00	Ruk. Kuba Tenu, Bangkato Utara, Bangkato Utara	PELAKSANAAN ASLI DAN BAKU (PAB)	Mendukung kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi	-	111.290.500,00	-	KANTOR GAMAT BANGKATA UTARA
	7.01.01.2.00.0002	Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	-	-	-	30 Laporan	30.000.000,00	Ruk. Kuba Tenu, Bangkato Utara, Bangkato Utara	PELAKSANAAN ASLI DAN BAKU (PAB)	Mendukung kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi	-	30.000.000,00	-	KANTOR GAMAT BANGKATA UTARA
								8.126.760.000,00							10.076.000.000,00	
	7.01.01.2.00.0003	Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penelitian Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pemerintahan Daerah	-	-	-	3 Laporan	11.000.000,00	Ruk. Kuba Tenu, Bangkato Utara, Bangkato Utara	PELAKSANAAN ASLI DAN BAKU (PAB)	Mendukung kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	4. Peningkatan kegiatan sosial dan lingkungan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi	-	12.076.025,00	-	KANTOR GAMAT BANGKATA UTARA
II	7.01.00	PROGRAM PEMELIHARAAN POMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						50.000.000,00							50.000.000,00	
		[MENINGKATKAN PEMELIHARAAN PELAYANAN PUBLIK RESTRUKTURISASI PELAYANAN PUBLIK]	Peningkatan Masyarakat yang diayak	60	58	55	70	50.000.000,00							50.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKAPITULASI OPD	REALISASI CAPAIAN REKAPITULASI OPD TAHUN 2024	PELAKSIAN CAPAIAN TARGET REKAPITULASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELEMBOR SASARAN	PRAKSIAN MAJU BENDAH TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PERANGKAP JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											AKRIBAL	DIRIBAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	7.91.98	PROGRAM PERBAIKAN DAN PERAWASAN PERSAWAHAN DESA	MEMBANGKITKAN PENGARAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAK DI WILAYAH REKAPITULASI BANGGATTA UTARA	-	-	-	100 %	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	
		[MEMBANGKITKAN PENGARAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAK DI WILAYAH REKAPITULASI BANGGATTA UTARA]	Pemerintahan Desa yang memerankan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	80	80	80	75	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	
	7.91.98.2.91	Facility, Dokumentasi dan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah desa	Meningkatkan Urusi	-	50.000.000,00	KANTOR CAMAT BANGGATTA UTARA	
7.91.98.2.91.0001	Facility Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
			Jumlah Dokumen yang Dibuat/diikuti dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	Rak. Rak. Teras Banggatta Utara Sumut Kallitosa	PEMERINTAHAN ASLI (DASAR) (PND)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah desa	Meningkatkan Urusi	-	50.000.000,00	KANTOR CAMAT BANGGATTA UTARA	
7.91.98.2.91.0002	Facility Pengembangan Rancangan Desa dan Penyelenggaraan Asat Desa																
			Jumlah Dokumen yang Dibuat/diikuti dalam rangka Pengembangan Rancangan Desa dan Penyelenggaraan Asat Desa	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000,00	Rak. Rak. Teras Banggatta Utara Sumut Kallitosa	PEMERINTAHAN ASLI (DASAR) (PND)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah desa	Meningkatkan Urusi	-	10.000.000,00	KANTOR CAMAT BANGGATTA UTARA	
		KANTOR LURAH TELUK LINGGA						19.894.674.890,00								19.894.674.890,00	
7		UNSUR KEMALAYAHAN						19.894.674.890,00								19.894.674.890,00	
7.91		REKAPITULASI						19.894.674.890,00								19.894.674.890,00	
7	7.91.91	PROGRAM PENGUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	
		[MEMBANGKITKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KANTOR LURAH TELUK LINGGA]	Indeks Profesionalitas ASN HIMPUNAN	75,00	75,00	75,00	70,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Organisasi Kecamatan dalam mencapai tujuan melaksanakan beberapa kegiatan yang berorientasi pada tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan koordinasi yang dituangkan dalam fungsi dan uraian kerja.

Dalam pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Faktor lingkungan sangat dominan dalam perencanaan strategis organisasi. Faktor tersebut terbagi kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi struktur organisasi, budaya kerja dan sumber daya organisasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pada kegiatan organisasi itu sendiri.

Lingkungan tersebut membuat sebuah organisasi harus melakukan perubahan yang mengikuti paradigma baru. Perubahan merupakan sebuah fenomena yang alamia sebagai makhluk yang terus berkembang. Kecamatan Sangatta Utara dengan menganalisa perubahan yang terjadi dan menelaah potensi masyarakat Kecamatan Sangatta Utara peluang dan tantangan, maka disusunlah sebuah rangkaian perencanaan kinerja yang tertuang dalam visi, misi, strategis dan program kerja Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangatta Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sangatta Utara. Untuk dapat merelisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2026 ini disusun sebagai tujuan Kecamatan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.